

**DAMPAK PEMEKARAN DI KELURAHAN MARIDAN
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

Edy Sutiyawan

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 1, Nomor 4, 2013**

DAMPAK PEMEKARAN DI KELURAHAN MARIDAN KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Edy Sutiyawan¹

Abstrak

Untuk mengetahui dampak pemekaran di Kelurahan Maridan Sebagai Kelurahan Induk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya dengan fokus Pelayanan Publik, Keuangan Kelurahan, Pengentasan kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemekaran Kelurahan memberikan dampak positif terhadap Pelayanan publik, Program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Maridan, Pelayanan publik menjadi lebih cepat dikarenakan tidak adanya antrian masyarakat sebagai penerima pelayanan, program pengentasan kemiskinan menjadi lebih fokus dalam melakukan pendataan dan merespon keluhan masyarakat, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik disebabkan pemerintah yang lebih fokus dalam melayani masyarakat dan juga program-program pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih efektif, Keuangan kelurahan tidak terkena dampak yang signifikan, hanya saja terjadi pengurangan jumlah Anggaran karena telah disesuaikan dengan variabel-variabel penentu Anggaran seperti penurunan jumlah penduduk, luas wilayah, volume pelayanan.

Kata Kunci: pemekaran, Kelurahan Maridan

Pendahuluan

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, memicu timbulnya pemekaran, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa “pemekaran wilayah dalam pengertian memecah Kecamatan/Kelurahan/Desa menjadi dua bagian atau lebih dengan pertimbangan karena luasnya wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk yang terlalu padat serta kondisi sosial budaya”.

Alasan di lakukannya Pemekaran Kelurahan Maridan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan maridan yaitu dari

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Edyharnum@gmail.com

berjumlah 10.095 jiwa pada tahun 2009. Pertambahan jumlah penduduk tersebut, secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Berdasarkan pertimbangan tersebut, kelurahan maridan dianggap sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti lamanya rentang waktu penyelesaian dalam pengurusan suatu pelayanan administrasi, pembangunan yang berjalan lambat, serta urusan pembinaan untuk kemasyarakatan yang menjadi kurang fokus, sehingga Pemekaran kelurahan dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Hasil penelitian Bappenas-UNDP pada tahun 2007 (dalam Jeddawi, 2007:118) berkesimpulan, bahwa secara umum setelah dilakukan pemekaran, daerah induk atau daerah kontrol berada dalam kondisi yang lebih baik dari pada daerah yang baru dibentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Dari sektor pelayanan publik, Pelayanan publik di daerah pemekaran belum berjalan optimal, disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain tidak efektifnya penggunaan dana, tidak tersediannya tenaga layanan publik, dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Sementara itu daerah induk atau daerah kontrol relatif stabil dan mengalami peningkatan.
2. Dari Sektor Keuangan Daerah, Peran anggaran pemerintah daerah pemekaran dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal dibandingkan dengan daerah kontrol atau daerah induk.
3. Dari sisi pengentasan kemiskinan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk ataupun daerah-daerah lainnya.
4. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, hasil studi menunjukkan bahwa daerah baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat.

Hasil penelitian Bappenas-UNDP di atas merupakan hasil penelitian terhadap daerah otonom baru dan daerah induknya di tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi hal tersebut dapat kita jadikan acuan bahwa seharusnya pemekaran daerah memberikan dampak yang positif terhadap daerah induk baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Pemekaran daerah tentunya tidak selalu berdampak positif terhadap daerah Induk, Hasil penelitian Litbang Kompas (dalam Jeddawi, 2007:120) menunjukkan bahwa dari 143 Daerah yang dievaluasi potensi perkembangan pembangunannya, 24 daerah induk atau sekitar 34 Persen perkembangan pembangunannya Sangat rendah.

Studi dan Penelitian mengenai Kebijakan pemekaran merupakan hal yang penting dilakukan, namun Studi dan penelitian yang dilakukan lebih banyak mengarah kepada daerah yang baru terbentuk, padahal daerah induk juga terkena dampak setelah dilakukan pemekaran. Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi Kelurahan Induk tentu sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Dampak Pemekaran di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana dampak pemekaran di Kelurahan Maridan sebagai Kelurahan Induk ?”

Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dampak pemekaran di Kelurahan Maridan Sebagai Kelurahan Induk.

Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a) Sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang memerlukan baik sebagai referensi yang lebih lanjut dalam bentuk penelitian ini.
 - b) Sebagai bahan informasi serta masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pemekaran kelurahan.
 - c) Sebagai bahan informasi serta masukan bagi mata kuliah yang berkaitan dengan Pemekaran Daerah.
2. Praktis
 - a) Sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah daerah kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang terkait dengan pemekaran kelurahan.

Kerangka Dasar Teori

Desentralisasi

Menurut Rondinelli (dalam Haris, 2005:61) desentralisasi merupakan “transfer of political power”. Desentralisasi itu sendiri setidaknya-tidaknya mempunyai dua kelompok tujuan yakni politik dan administratif. Tujuan politiknya adalah dalam rangka demokratisasi, sedangkan tujuan administratifnya adalah dalam rangka efektifitas dan efisiensi.

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri (Kansil dkk, 2002:3).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan warga Kesatuan Republik Indonesia. Didalam konsep otonomi daerah tersebut terkandung azas-azas dan prinsip-prinsip yang sama dalam pelaksanaannya. Tetapi tetap dalam kerangka persatuan bangsa (Syaukani, 1999:60).

Esensi otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian. Dengan pemberdayaan, maka daerah otonom akan semakin memiliki kemampuan untuk mengolah kewenangannya. Melalui kemandirian, maka daerah otonom, dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara lebih leluasa dan inovatif. Pemberdayaan dan kemandirian yang diberikan arahnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Jeddawi, 2009:3).

Pemekaran

Pemekaran menurut Bahasa adalah memisahkan diri, mengembangkan atau mengembangkan diri menjadi lebih dari satu, dalam konteks pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru yang berasal dari satu wilayah induk dari wilayah tersebut.

Pemekaran dilakukan bertujuan untuk segera mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sebab penumpukan pembangunan pada satu kawasan jelas tidak adil. Maka untuk segera mewujudkan keadilan itu satu-satunya jalan adalah dengan pemekaran wilayah. Sedangkan tujuan khusus pemekaran wilayah antara lain : (Syaukani, 1999:100)

Pertama, untuk segera pemeratakan pembangunan secara adil dan bijaksana. Kedua, agar masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ibukota kabupaten yang selama ini belum merasakan nikmatnya potensi kekayaan alam, bisa segera merasakan. Ketiga, untuk mempercepat partisipasi dan kemandirian masyarakat melauai azas pemberdayaan. Keempat, agar jarak jangkauan rentang kendali pemerintahan menjadi pendek. Kelima, agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang baru dimekarkan memiliki keberanian untuk mengembangkan diri berdasarkan kemampuan sendiri disegala bidang.

Kelurahan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kemudian dijelaskan Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dampak Pemekaran di Kelurahan Maridan adalah Pembentukan Wilayah Baru yaitu Desa Binuang dan Desa Telemow, yang berasal dari Wilayah Induk yaitu Kelurahan Maridan, yang bertujuan memberikan dampak yang positif terhadap Pelayanan Publik, Keuangan kelurahan, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Maridan Sebagai Kelurahan Induk.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode Penelitian deskriptif adalah merupakan suatu metode yang banyak dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif (Soejono dkk, 2005:19).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang/jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. (Satori dkk, 2009 : 22)

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. (dalam Azwar, 2009: 5)

Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. (Moleong, 2001: 237).

Sesuai dengan Rumusan Masalah, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dampak Pemekaran di Kelurahan Maridan Sebagai Kelurahan Induk :

- a) Pelayanan Publik
- b) Keuangan Kelurahan
- c) Pengentasan kemiskinan
- d) Pertumbuhan Ekonomi

Lokasi penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Untuk menentukan nara sumber dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling yang dipadukan dengan teknik snowball. Menurut Sutrisno (dalam Hamidi, 2008 : 89) Purposive sampling adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Subjek tersebut merupakan kelompok kunci dari kelompok yang ada dalam populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi key informans (informan kunci) dalam pengumpulan data adalah Bapak Sumardian Selaku Staf Senior di Kelurahan Maridan.

Kemudian untuk memperoleh informasi lebih lengkap digunakan teknik snowball, yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap (Satori dkk, 2009:53). Dari pengertian tersebut peneliti menentukan bahwa setiap fokus penelitian memiliki informan yang berbeda, peneliti menetapkan informans sebagai berikut:

- a) Dampak pemekaran terhadap pelayanan publik, yang menjadi informan adalah staf kelurahan maridan dan masyarakat yang datang ke kantor Kelurahan untuk mengurus administrasi kependudukan.
- b) Dampak pemekaran terhadap keuangan Kelurahan, yang menjadi informan adalah staf Kelurahan yang mengurus urusan keuangan di kelurahan Maridan.
- c) Dampak pemekaran terhadap Pengentasan Kemiskinan, yang menjadi informan adalah staf kelurahan yang mengurus urusan pendataan, pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah dan masyarakat tidak mampu yang menjadi target dari program tersebut.
- d) Dampak pemekaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang menjadi informan adalah staf kelurahan yang mengurus urusan pendataan dan masyarakat yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Maridan.

Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik Pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Work Research)

a) Observasi

Menurut Syaodih N (dalam Satori dkk, 2009:105) Observasi yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan melihat langsung dampak yang ditimbulkan akibat pemekaran terhadap Kelurahan Maridan Sebagai wilayah induk .

b) Wawancara (Interview)

Menurut Sudjana (dalam Satori dkk, 2009:130) Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee), metode ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak terkait masalah penelitian.

c) Dokumen

Menurut Renier (dalam Satori dkk, 2009:147) dokumen memiliki tiga pengertian yaitu :

1. Dalam arti luas meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan;
2. Dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja;
3. Dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsensi, hibah dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Deskriptif Kualitatif melalui data sekunder. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Satori dkk, 2009:38) bahwa analisis data deskriptif kualitatif terdiri atas empat Tahap yaitu :

1. Tahap pengumpulan (Data Collection)
2. Tahap reduksi data (Data Reduction)
3. Tahap penyajian data (Data Display)
4. Tahap Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verifying)

Hasil Penelitian dan pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Maridan mempunyai 23 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah 1.275 Kepala Keluarga (KK). Luas wilayah Kelurahan Penajam kurang lebih 28 Km² dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Telemow
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Riko

- 3) Sebelah Timur : Kelurahan Mentawir
- 4) Sebelah Barat : Desa Binuang

Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kelurahan Maridan sebanyak 5.001 jiwa dan terdiri dari 1.275 KK yang tersebar pada 23 Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Penduduk Kelurahan Maridan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1.	Laki – laki	2.578
2.	Perempuan	2.423
Jumlah		5.001

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Maridan bermacam-macam. Sebagian besar berpendidikan tamat SMU/SLTA walaupun ada juga yang jenjang perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Penduduk Kelurahan Maridan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	432
2.	SMP/SLTP	451
3.	SMA/SLTA	1.521
4.	Akademi/D1- D3	251
5.	Sarjana/S1-S3	108
Jumlah		2.763

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Atau Mata Pencarian

Dengan melihat data di atas Masyarakat di Kelurahan Maridan di dominasi oleh Petani, Pengusaha Kecil dan menengah dan Karyawan Swasta, sehingga pemerintah seharusnya dapat membantu memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Petani dan Pengusaha Kecil dan menengah

Tabel 4.3
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	113	43
2	Buruh Tani	43	3
3	Pegawai Negeri Sipil	52	45
4	Pengrajin Industri Rumah tangga	-	-
5	Pedagang keliling	28	10
6	Peternak	25	30
7	Nelayan	30	10
8	Montir	15	-
9	Dokter Swasta	4	1
10	Bidan Swasta	-	2
11	Perawat swasta	8	9
12	Pembantu Rumah Tangga	-	20
13	TNI	1	-
14	POLRI	10	-
15	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10	-
16	Pengusaha Kecil dan Menengah	20	30
17	Dukun Kampung Terlatih	-	5
18	Jasa Pengobatan Alternatif	5	-
19	Karyawan Swasta	250	170
20	Lain-lain	1964	2045
Jumlah		2578	2423

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan kepercayaan atau agama yang dianut oleh penduduk kelurahan loa bakung juga bervariasi.

Tabel 4.4
Penduduk Kelurahan Maridan berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	2.661
2.	Kristen	2.032
3.	Katholik	308
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		5.001

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Berdasarkan Tabel jumlah penduduk berdasarkan Agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Maridan diketahui Agama Islam sebanyak 2661 orang, dan Protestan Sebanyak 2032 orang, lalu katolik sebanyak 308 orang, sedangkan pemeluk hindu dan budha tidak ada di Kelurahan Maridan.

Dampak Pemekaran di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan dilakukannya pemekaran Kelurahan maka diharapkan Kualitas Pelayanan publik akan semakin membaik.

Pemekaran kelurahan memberikan dampak berkurangnya kuantitas pelayanan publik di Kelurahan Maridan, dengan berkurangnya kuantitas pelayanan secara otomatis meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan, karena petugas akan lebih fokus, cepat dan maksimal dalam melayani masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Sebelum pemekaran dilakukan, masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan namun setelah pemekaran sesuai dengan observasi penulis dilapangan tidak terlihat adanya antrian masyarakat sebagai penerima pelayanan. kemudian masih terdapat kendala yang dikeluhkan masyarakat yaitu pada saat mengurus Surat segel tanah, keluhan tersebut terkait prosedur yang mewajibkan pengukuran tanah dilakukan oleh petugas kecamatan sehingga masyarakat harus menunggu petugas dari kecamatan. Kemudian kendala lainnya yang dikeluhkan masyarakat yaitu kurang disiplinnya petugas pelayanan di Kelurahan Maridan.

Untuk memperkuat data Primer mengenai pelayanan publik di Kelurahan Maridan, penulis menggunakan dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2012 sebagai data sekunder. Jumlah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit pelayanan di Kelurahan Maridan Tahun 2012 adalah 39.71, dengan nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2,83 dengan kategori **Baik**.

Hasil dari Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Maridan dapat menggambarkan bahwa Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Maridan tergolong Baik, hal tersebut dikarenakan 14 unsur dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasil rata-ratanya berada pada range Baik, hasil tersebut semakin menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Maridan semakin baik sebagai dampak dari dilakukannya pemekaran, hal tersebut juga sejalan dengan kesimpulan Bappenas-UNDP pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemekaran, pelayanan publik di daerah induk akan stabil dan mengalami peningkatan.

Keuangan Kelurahan

Keuangan Kelurahan merupakan administrasi yang mengurus keluar masuknya uang dalam suatu lembaga dalam hal ini adalah Kelurahan, Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Keuangan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.

Berikut ini data rincian jumlah anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran di Kelurahan Maridan sebelum dan sesudah dilakukan pemekaran :

Tabel 4.5
Rincian Jumlah Anggaran Kelurahan

Variabel Perbandingan	Uraian	Sebelum Pemekaran (2009)	Setelah Pemekaran (2012)
Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	Rp 1,650,672,513.00	Rp 472,510,352.00
Belanja Langsung	Belanja Pegawai	Rp 234,542,000.00	Rp 80,440,350.00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 815,606,200.00	Rp 188,760,200.00
	Belanja Modal	Rp 119,850,000.00	Rp 43,314,042.00
Jumlah Anggaran		Rp 2,820,620,713.00	Rp 785,024,944.00

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Berkurangnya jumlah penduduk tersebut secara otomatis mengurangi volume pelayanan di Kelurahan Maridan, dengan berkurangnya volume pelayanan berdampak kepada menurunnya konsumsi barang dan jasa seperti kebutuhan alat tulis kantor, perangkko, materai, belanja cetak dan penggandaan, belanja listrik dan lain-lain, sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa, kemudian adanya pengurangan jumlah staf pelaksana di kelurahan Maridan, yang sebelumnya berjumlah 14 orang kemudian pada tahun 2012 berkurang menjadi 7 orang, penurunan jumlah staf pelaksana tersebut menyebabkan penurunan jumlah anggaran belanja pegawai, baik anggaran belanja pegawai yang termasuk belanja tidak langsung seperti Gaji dan tunjangan, maupun anggaran belanja pegawai yang termasuk belanja langsung seperti honorium PNS dan non PNS. Penurunan Jumlah anggaran belanja pegawai, anggaran belanja barang dan jasa, dan belanja modal, tidak berdampak negatif bagi keseimbangan keuangan di kelurahan Maridan, hal tersebut dikarenakan jumlah anggaran telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan di kelurahan Maridan dan telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pengentasan Kemiskinan

Program Raskin

RASKIN merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program RASKIN bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Pemekaran Kelurahan menyebabkan menurunnya jumlah penerima program RASKIN, Pengurangan tersebut akibat adanya penyesuaian dengan jumlah penerima program RASKIN yang membutuhkan sehingga pengurangan tersebut tidak bertampak negatif bagi masyarakat. Adanya pengurangan jumlah penerima RASKIN tersebut secara otomatis meningkatkan kinerja petugas yang bertanggungjawab mengurus program tersebut, petugas menjadi lebih fokus dalam hal melakukan pendataan, menerima masukan dan keluhan dari masyarakat, dan juga menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah kabupaten, sehingga dampak positif dari pemekaran kelurahan terhadap program RASKIN ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

PNPM-Pedesaan

Setelah dilakukannya pemekaran di Kelurahan Maridan, jumlah penerima PNPM-Pedesaan di kelurahan Maridan menjadi berkurang, adanya pengurangan jumlah penerima PNPM-Pedesaan tersebut membantu Tim Pengelola Kegiatan PNPM-Pedesaan di Kelurahan Maridan menjadi lebih fokus melakukan seleksi terhadap masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dan juga lebih fokus melakukan pendataan masyarakat penerima dan pengembalian pinjaman, hal tersebut dikarenakan berkurangnya luas wilayah kelurahan Maridan pasca pemekaran sehingga ruang lingkup penerima PNPM-Pedesaan menjadi lebih kecil.

Dengan adanya Pengurangan jumlah penerima Program PNPM-Pedesaan di Kelurahan Maridan, Tim Pengelola Kegiatan PNPM-Pedesaan menjadi lebih fokus melakukan pendataan masyarakat penerima dan pengembalian pinjaman, dengan lebih fokusnya tim pengelola kegiatan secara otomatis mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dan pengembalian pinjaman sehingga dampak pemekaran terhadap PNPM-Pedesaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Setelah dilakukannya pemekaran, pendapatan perkapita masyarakat kelurahan Maridan mengalami peningkatan. Sektor yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah sektor perkebunan dan sektor jasa dan perdagangan, di sektor perkebunan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat meningkat hingga 333 %, pada tahun 2009 berjumlah Rp 1,500,000.00 kemudian pada tahun 2012

meningkat hingga Rp 5,000,000.00, selanjutnya dari sektor perdagangan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat meningkat hingga 100 %, pada tahun 2009 berjumlah Rp 500,000.00 kemudian pada tahun 2012 meningkat hingga Rp1,000,000.00.

Perekonomian masyarakat di Kelurahan Maridan mengalami peningkatan khususnya dibidang perkebunan dan usaha kecil dan menengah. Dibidang perkebunan, Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh lebih fokusnya pemerintah dalam melayani masyarakat dan juga program-program pemerintah yang berkaitan dengan perkebunan seperti sosialisasi penanaman, perawatan, dan peningkatan hasil panen perkebunan menjadi lebih efektif, kemudian dibidang Usaha Kecil dan Menengah juga mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dapat dilihat dari bermunculannya usaha-usaha seperti warung, toko, counter pulsa, dan lain-lain. Peningkatan tersebut dikarenakan program yang berkaitan langsung dengan peningkatan usaha kecil dan menengah yaitu PNPM-Pedesaan juga menjadi lebih efektif, menjadi lebih mengena dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Kelurahan Maridan, hal tersebut sesuai dengan hasil studi Bappenas-UNDP pada tahun 2007 (dalam Jeddawi, 2007:118) menunjukkan bahwa setelah pemekaran di lakukan, dari segi pertumbuhan ekonomi daerah induk relatif stabil dan meningkat.

Penutup

Dampak Pemekaran terhadap pelayanan publik

Berkurangnya kuantitas pelayanan secara otomatis meningkatkan kualitas pelayanan di Kelurahan Maridan, berkurangnya kuantitas pelayanan juga berdampak menurunnya disiplin petugas pelayanan, petugas menjadi sering keluar disaat jam kerja masih berlangsung walaupun masih dapat diatasi oleh petugas lain yang bersiaga untuk melayani masyarakat yang datang, kemudian juga terdapat kendala seperti kosongnya beberapa jabatan penting namun petugas pelayanan dalam hal ini staf Kelurahan dapat mengatasi kendala tersebut dan menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dampak Pemekaran terhadap keuangan kelurahan

Keuangan kelurahan tidak terkena dampak yang signifikan, hanya saja terjadi pengurangan jumlah Anggaran karena telah disesuaikan dengan variabel-variabel penentu Anggaran seperti penurunan jumlah penduduk, luas wilayah, volume pelayanan.

Dampak Pemekaran terhadap pengentasan kemiskinan

Program Raskin

Adanya pengurangan jumlah penerima Program RASKIN yang telah disesuaikan, petugas yang bertanggungjawab mengurus program RASKIN menjadi lebih fokus dalam hal melakukan pendataan, menerima masukan dan

keluhan dari masyarakat, dan juga menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah kabupaten, sehingga dampak positif dari pemekaran kelurahan terhadap program RASKIN ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

PNPM Mandiri

Pemekaran berdampak positif terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Maridan, terjadi pengurangan jumlah penerima PNPM Mandiri yang telah disesuaikan sehingga pengurangan tersebut membantu Tim Pengelola Kegiatan menjadi lebih fokus dalam hal melakukan pendataan masyarakat penerima dan juga pengembalian pinjaman, sehingga dampak pemekaran terhadap PNPM-Pedesaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dampak Pemekaran terhadap pertumbuhan ekonomi

Pemekaran berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kelurahan Maridan, khususnya dibidang perkebunan dan Usaha Kecil dan Menengah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih fokus dalam melayani masyarakat dan juga program-program pemerintah yang berkaitan dengan perkebunan dan peningkatan Usaha Kecil dan Menengah menjadi lebih efektif.

Berdasarkan Hasil Kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Untuk meningkatkan kedisiplinan petugas pelayanan di Kelurahan Maridan dengan memberikan pengawasan yang lebih intensif, baik pengawasan dari masyarakat selaku penerima pelayanan maupun dari pemerintah kabupaten berupa pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap petugas yang tidak disiplin.

Untuk meningkatkan Transparansi mengenai keuangan kelurahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana pengelolaan dana baik pemasukan maupun pengeluaran di Kelurahan Maridan.

Pelaksana program-program pengentasan kemiskinan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan dapat bertanggungjawab penuh terhadap program yang dijalankan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Maridan.

Pemerintah agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan dan sosialisasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kelurahan Maridan.

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Prososal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Satori, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani. 1999. *Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah*. Tenggarong: Lembaga Studi Pembangunan Kalimantan Timur.

Dokumen- dokumen :

- Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 06 tahun 2010 tentang *Pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku*.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang -undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*